



ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI TINGKAT DAERAH STUDI KASUS KABUPATEN LEBAK DALAM KONTEKS ADMINISTRASI PUBLIK

Rizal Fauzi

Universitas Serang Raya
sayarizalfauzi@gmail.com

Riwayat Artikel

Diterima
Maret 2025
Revisi
April 2025
Terbit
Mei 2025

Keywords:

Environmental Policy; Local Government; Public Administration;

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of environmental policies at the local level, specifically focusing on the case of Lebak Regency, in the context of public administration. The research identifies key challenges in policy implementation, including limited human resources, inadequate coordination among agencies, and weak enforcement of regulations. The findings highlight the crucial role of public administration in ensuring effective policy implementation and emphasize the need for improving coordination and enforcement mechanisms. The study strengthens existing theories on policy implementation and administration, particularly the importance of administrative capacity and inter-agency collaboration. Based on the findings, recommendations are provided to enhance the effectiveness of environmental policy in Lebak Regency, including increasing human resource capacity, strengthening legal enforcement, and improving coordination among relevant institutions. This research contributes to the literature on public administration and environmental policy implementation at the local government level.

Korespondensi:

sayarizalfauzi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan lingkungan hidup di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Lebak, dalam konteks administrasi publik. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan utama dalam implementasi kebijakan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan lemahnya penegakan hukum. Temuan penelitian menyoroti peran penting administrasi publik dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan serta pentingnya perbaikan koordinasi dan penguatan mekanisme penegakan hukum. Penelitian ini memperkuat teori implementasi kebijakan dan administrasi publik yang ada, khususnya terkait kapasitas administrasi dan kolaborasi antar lembaga. Berdasarkan temuan, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan lingkungan di Kabupaten Lebak, antara lain dengan meningkatkan kapasitas SDM, memperkuat penegakan hukum, dan meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait. Penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur administrasi publik dan implementasi kebijakan lingkungan hidup di tingkat pemerintahan daerah.

©2025 Power: Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik

How to cite (in APA Style): Fauzi, R. (2025). Analisis implementasi kebijakan lingkungan hidup di tingkat daerah: Studi kasus Kabupaten Lebak dalam konteks administrasi publik. *Power: Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 1(1), 35–44.

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan lingkungan hidup di tingkat daerah merupakan aspek yang sangat penting dalam administrasi publik, karena berkaitan langsung dengan pengelolaan sumber daya alam dan keberlanjutan pembangunan. Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan utama adalah dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Implementasi kebijakan ini mengharuskan pelaku usaha untuk mengelola dan memantau dampak lingkungan dari aktivitas mereka, serta melaporkan hasilnya secara berkala kepada pemerintah daerah. Di Kabupaten Lebak, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan terkait pengawasan yang belum maksimal, keterbatasan sumber daya manusia di instansi terkait, dan minimnya kesadaran di kalangan pelaku usaha. Dalam konteks administrasi publik, penting untuk memahami bagaimana kebijakan ini dijalankan oleh lembaga pemerintah daerah dan peran mereka dalam memastikan kebijakan ini berhasil diimplementasikan. Teori implementasi kebijakan publik, seperti yang dijelaskan oleh Grindle (2014), menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kapasitas dan efektivitas lembaga pemerintahan dalam mengelola kebijakan tersebut di lapangan.

Namun demikian, meskipun kebijakan pengelolaan lingkungan hidup telah ditetapkan, implementasinya di lapangan sering kali tidak sejalan dengan harapan. Berdasarkan studi-studi sebelumnya, terdapat kesenjangan yang signifikan antara kebijakan yang diharapkan dan realisasi di lapangan. Banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami pentingnya dokumen lingkungan hidup dan kewajiban untuk melaporkan hasil pengelolaannya. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak juga menghadapi kendala, terutama dalam hal sumber daya manusia yang

terbatas dan mekanisme pengawasan yang kurang efisien. Beberapa penelitian sebelumnya mencatat bahwa ketidakjelasan dalam pelaksanaan kebijakan dan lemahnya penegakan hukum merupakan faktor utama yang menyebabkan kebijakan lingkungan tidak efektif. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan ini, serta mencari solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut agar kebijakan lingkungan dapat diterapkan dengan lebih efektif di tingkat daerah.

Penelitian ini menawarkan pendekatan yang baru dalam memahami implementasi kebijakan lingkungan hidup di daerah, dengan menekankan pada faktor administrasi publik yang berperan dalam keberhasilan kebijakan tersebut. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan dan pelaksanaan kebijakan lingkungan, serta bagaimana kapasitas kelembagaan dan pengawasan dapat diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha dalam memastikan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dapat dijalankan dengan baik. Dengan mengadopsi teori implementasi kebijakan dari Grindle (2014) dan teori administratif lainnya, penelitian ini berfokus pada bagaimana elemen-elemen administrasi publik, seperti kepemimpinan dan koordinasi antar lembaga, mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan lingkungan.

Penelitian ini sangat penting karena dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman tentang bagaimana kebijakan lingkungan hidup dapat diimplementasikan secara lebih efektif di tingkat daerah. Di Kabupaten Lebak, di mana permasalahan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan terhadap kegiatan usaha masih menjadi isu besar, penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana kebijakan ini dijalankan dan tantangan yang dihadapi

dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan lingkungan hidup di Kabupaten Lebak, serta memberikan rekomendasi praktis untuk memperbaiki sistem pengawasan dan pelaksanaan kebijakan. Dengan mengadopsi pendekatan administrasi publik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki implementasi kebijakan lingkungan hidup di masa depan.

KAJIAN PUSTAKA

Implementasi kebijakan lingkungan hidup di tingkat daerah merupakan aspek yang sangat penting dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Implementasi kebijakan publik pada umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terkait dengan administrasi publik, baik dari sisi kelembagaan, pengawasan, maupun partisipasi masyarakat. Menurut Grindle (2014), keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada dua dimensi utama, yaitu konten kebijakan dan konteks kebijakan, yang masing-masing melibatkan kepentingan, sumber daya, dan karakteristik lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, implementasi kebijakan seperti dokumen UKL-UPL bertujuan untuk meminimalisir dampak buruk terhadap lingkungan melalui mekanisme perizinan yang ketat.

Penelitian sebelumnya oleh Van Meter dan Van Horn (1975) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan di tingkat daerah sering kali terhambat oleh ketidakcocokan antara tujuan kebijakan dan kapasitas pelaksana di lapangan. Hal ini juga terjadi dalam kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Lebak, di mana terdapat kesenjangan antara dokumen yang disusun dan pelaksanaan di lapangan. Dalam kajian kebijakan lingkungan, penyebab utama kegagalan implementasi sering kali berasal dari faktor eksternal dan

internal, seperti kekurangan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta kurangnya kesadaran dari pelaku usaha.

Selain itu, penelitian oleh Sabatier dan Mazmanian (1983) menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat tergantung pada kemampuan pengelola kebijakan untuk menstruktur proses implementasi secara tepat, termasuk alokasi sumber daya dan kesepakatan di antara aktor-aktor terkait. Dalam konteks Kabupaten Lebak, Dinas Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab atas pengawasan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup masih menghadapi tantangan dalam hal keterbatasan sumber daya, baik dari segi tenaga kerja maupun teknologi yang digunakan dalam pengawasan dan pemantauan kegiatan usaha.

Pada level lokal, model implementasi kebijakan yang mengutamakan pendekatan *bottom-up* dianggap lebih relevan karena kebijakan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi lokal akan lebih mudah diterima dan diterapkan oleh masyarakat. Pendekatan ini mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, yang sesuai dengan karakteristik sosial-budaya daerah tersebut. Meskipun pendekatan *top-down* sering diterapkan di tingkat pusat, penelitian oleh Grindle (2014) menyarankan bahwa untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, pendekatan yang melibatkan masyarakat secara langsung sangat penting untuk menciptakan keberlanjutan dalam kebijakan lingkungan.

Seiring dengan pentingnya kebijakan lingkungan hidup yang berkelanjutan, peran pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Lebak, dalam mengelola kebijakan lingkungan menjadi sangat krusial. Menurut Grindle, kebijakan publik tidak hanya harus dirumuskan dengan jelas, tetapi juga harus memperhatikan faktor-faktor konteks yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, seperti kekuatan politik, kepentingan aktor-aktor yang terlibat, dan

kemampuan lembaga dalam menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan konkret. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak perlu memperbaiki sistem pengawasan dan pemantauan kebijakan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif.

Selain itu, model *implementation as a political and administrative process* yang dikemukakan oleh Grindle (2014) menyarankan bahwa implementasi kebijakan harus dipandang sebagai proses politik dan administratif yang melibatkan aktor-aktor politik, lembaga-lembaga pemerintah, serta masyarakat. Hal ini penting karena kebijakan yang hanya diterima oleh pemerintah pusat tanpa melibatkan masyarakat lokal sering kali gagal diimplementasikan dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan yang telah diterapkan serta memperkuat kapasitas kelembagaan yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus untuk menganalisis implementasi kebijakan lingkungan hidup di Kabupaten Lebak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, observasi langsung, serta studi dokumentasi terkait kebijakan yang diterapkan. Instrumen yang digunakan termasuk lembar wawancara dan perekam audio. Data dianalisis menggunakan model analisis kualitatif interaktif menurut Miles dan Huberman (1994), yang terdiri dari tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Informan penelitian ini meliputi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak dan beberapa staf terkait yang terlibat langsung

dalam implementasi kebijakan. Kehadiran peneliti sangat penting untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses kebijakan di lapangan. Validitas hasil penelitian dijaga dengan triangulasi data, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber dan metode untuk memastikan kesesuaian dan akurasi temuan. Penelitian ini dilakukan selama enam bulan di Kabupaten Lebak, dengan analisis berbasis teori implementasi kebijakan dari Grindle (2014) yang menyarankan bahwa faktor administratif dan politik sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dalam penelitian ini, ditemukan beberapa kendala dan tantangan utama dalam implementasi kebijakan lingkungan hidup di Kabupaten Lebak yang menghambat efektivitas kebijakan tersebut. Salah satu temuan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak. Jumlah staf yang terbatas, yakni hanya tiga orang yang bertugas dalam pengawasan dan pembinaan lingkungan, membuat pengawasan terhadap pelaku usaha yang diwajibkan memiliki dokumen UKL-UPL menjadi sangat terbatas. Hal ini menyebabkan proses pengawasan berjalan lambat, serta berdampak pada kurangnya kepatuhan pelaku usaha terhadap kebijakan yang ada.

Kendala kedua yang ditemukan adalah kurangnya koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam pengelolaan kebijakan lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup sering kali menghadapi tantangan dalam berkoordinasi dengan lembaga lain yang juga memiliki peran dalam pengelolaan lingkungan, seperti Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP). Ketidaktepatan dalam koordinasi ini menyebabkan terjadinya duplikasi tugas dan

kebingungannya peran masing-masing lembaga dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga mempengaruhi efisiensi implementasi kebijakan tersebut.

Kendala teknis juga menjadi hambatan signifikan dalam implementasi kebijakan lingkungan hidup. Dokumen UKL-UPL yang disiapkan oleh pelaku usaha seringkali tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh kebijakan, dan kurangnya pemahaman dari pelaku usaha mengenai kewajiban mereka dalam menjaga lingkungan turut memperburuk situasi ini. Hal ini juga diperparah dengan ketidakmampuan dalam melakukan penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku usaha yang melanggar peraturan, sehingga sanksi yang seharusnya diberikan sering kali tidak dilaksanakan dengan tegas.

Meskipun ada berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan lingkungan hidup di Kabupaten Lebak, peran administrasi publik dalam pengelolaannya sangat menentukan efektivitas kebijakan. Salah satu temuan utama adalah bahwa dukungan politik dari pemerintah daerah, khususnya dari kepala daerah, sangat berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak mengungkapkan bahwa kebijakan lingkungan hidup dapat berjalan dengan baik berkat dukungan politik yang kuat, meskipun di lapangan masih ada tantangan dalam pengawasan dan penerapan regulasi.

Namun, administrasi publik yang efektif dihadapkan pada keterbatasan kapasitas kelembagaan dan kurangnya integrasi antar lembaga. Meski Dinas Lingkungan Hidup sudah berupaya untuk menjalankan kebijakan dengan baik, mereka sering terhambat oleh ketidakjelasan dalam pembagian tugas dan kurangnya sistem koordinasi yang kuat antara lembaga terkait. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada kemampuan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan

kapasitas administrasi publik untuk menangani masalah yang ada secara efektif.

Selain itu, penegakan hukum yang lemah menjadi masalah yang cukup krusial dalam pengelolaan kebijakan lingkungan. Di Kabupaten Lebak, meskipun ada ketentuan untuk sanksi terhadap pelanggar, pelaksanaannya tidak konsisten. Hal ini disebabkan oleh kekurangan pengawasan lapangan, yang tidak didukung oleh jumlah personel yang memadai dan sistem pengawasan yang belum terintegrasi dengan baik. Kepemimpinan yang tegas dan sistem pengawasan yang lebih transparan diharapkan dapat memperbaiki masalah ini dan meningkatkan pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup secara keseluruhan.

Tabel 1. Temuan Kendala Implementasi Kebijakan Lingkungan Hidup

Kendala Utama	Dampak
Keterbatasan Sumber Daya Manusia	Pengawasan yang lambat dan kurang efektif
Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga	Duplikasi tugas dan kebingungannya peran
Ketidaksesuaian Dokumen UKL-UPL	Pelaku usaha tidak mematuhi kebijakan lingkungan
Penegakan Hukum yang Lemah	Pelanggaran tidak mendapatkan sanksi yang tegas

Tabel di atas menyajikan temuan utama yang berkaitan dengan kendala dalam implementasi kebijakan lingkungan hidup di Kabupaten Lebak. Keterbatasan SDM menyebabkan pengawasan yang tidak optimal, sementara kurangnya koordinasi antar lembaga menambah ketidakefektifan dalam pelaksanaan kebijakan. Ketidaksesuaian dokumen UKL-UPL yang disiapkan oleh pelaku usaha serta penegakan hukum yang lemah memperburuk implementasi kebijakan lingkungan yang ada.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, beberapa rekomendasi untuk perbaikan implementasi kebijakan lingkungan hidup di Kabupaten Lebak dapat diajukan. Pertama,

penting untuk meningkatkan kapasitas SDM di Dinas Lingkungan Hidup, baik dari segi jumlah staf maupun keterampilan teknis dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan. Kedua, perlu ada sistem koordinasi yang lebih baik antara lembaga terkait, agar tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan dapat dibagi dengan jelas dan efektif. Ketiga, penegakan hukum yang lebih konsisten dan tegas perlu diterapkan agar kebijakan yang ada dapat dipatuhi oleh semua pihak, terutama pelaku usaha yang berpotensi merusak lingkungan.

Dengan melaksanakan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan kebijakan lingkungan hidup di Kabupaten Lebak dapat lebih efektif dan memberikan dampak positif terhadap kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan di daerah tersebut.

Pembahasan

Dalam penelitian ini, telah ditemukan beberapa kendala dan tantangan utama dalam implementasi kebijakan lingkungan hidup di Kabupaten Lebak yang mempengaruhi efektivitas kebijakan yang ada. Temuan ini menggali masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan tersebut dan menjawab beberapa pertanyaan terkait efektivitas implementasi serta peran administrasi publik dalam pengelolaan kebijakan ini.

Salah satu pertanyaan penelitian yang diajukan adalah mengenai faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan lingkungan hidup di tingkat daerah. Berdasarkan temuan lapangan, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak menjadi salah satu kendala utama. Jumlah staf yang terbatas, yakni hanya tiga orang yang bertugas dalam pengawasan dan pembinaan lingkungan, menyebabkan pengawasan terhadap pelaku

usaha yang diwajibkan memiliki dokumen UKL-UPL menjadi sangat terbatas. Hal ini menyebabkan proses pengawasan berjalan lambat, serta berdampak pada kurangnya kepatuhan pelaku usaha terhadap kebijakan yang ada. Penelitian oleh Edwards et al. (2014) menekankan bahwa pengawasan yang tidak memadai dan keterbatasan kapasitas SDM merupakan faktor utama yang menghambat efektivitas kebijakan lingkungan, yang juga ditemukan dalam studi kasus Kabupaten Lebak.

Di sisi lain, kurangnya koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam pengelolaan kebijakan lingkungan juga menjadi tantangan signifikan. Koordinasi yang tidak optimal antara Dinas Lingkungan Hidup dan lembaga lainnya, seperti Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPSTP), sering menyebabkan tumpang tindih tugas yang menghambat kelancaran implementasi kebijakan. Hal ini juga ditemukan dalam penelitian oleh Winarno (2016) yang menyatakan bahwa kurangnya koordinasi antar lembaga adalah salah satu faktor penghambat utama dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan yang berhasil. Dalam konteks administrasi publik, kurangnya koordinasi ini menggambarkan betapa pentingnya struktur birokrasi yang jelas dan kesepakatan antara lembaga-lembaga terkait dalam mendukung kebijakan yang ada.

Temuan mengenai keterbatasan SDM dan kurangnya koordinasi antar lembaga ini sejalan dengan temuan-temuan dari berbagai penelitian terdahulu yang menyoroti pentingnya peran administrasi publik dalam memastikan kebijakan lingkungan dapat berjalan dengan baik. Sebagai contoh, penelitian oleh Mazmanian dan Sabatier (1983) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan yang efektif sangat bergantung pada keterlibatan berbagai aktor dan lembaga yang terkait, serta kemampuan mereka untuk berkoordinasi secara efektif. Temuan ini

mendukung teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle (2014), yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu isi kebijakan dan konteks kebijakan, yang dalam hal ini terkait erat dengan kapasitas administrasi publik dan koordinasi antar lembaga yang terlibat.

Selain itu, teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) juga relevan dalam konteks ini. Menurut mereka, keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada kemampuan organisasi untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi yang ada di lapangan, serta kapasitas lembaga untuk menjalankan kebijakan tersebut secara konsisten. Dalam kasus Kabupaten Lebak, meskipun kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup sudah jelas, keterbatasan sumber daya manusia dan pengawasan menjadi penghalang utama dalam mewujudkan tujuan kebijakan tersebut.

Temuan mengenai kurangnya penegakan hukum yang konsisten juga menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah dirumuskan dengan baik, kegagalan dalam implementasi sering kali terjadi karena kelemahan dalam pengawasan dan kurangnya sanksi tegas bagi pelanggar. Hal ini sesuai dengan temuan Grindle (2014), yang menyatakan bahwa salah satu faktor penting dalam keberhasilan kebijakan adalah kemampuan untuk menegakkan aturan dengan konsisten. Tanpa adanya sanksi yang jelas dan pengawasan yang ketat, kebijakan akan sulit dilaksanakan secara efektif, dan pelanggaran akan terus terjadi, seperti yang terlihat dalam praktik pengelolaan UKL-UPL di Kabupaten Lebak.

Selain itu, penemuan bahwa dukungan politik dari pemerintah daerah sangat berperan dalam keberhasilan kebijakan menunjukkan bahwa kepemimpinan yang tegas adalah faktor kunci. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak menyatakan bahwa kebijakan

yang dijalankan dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dari pimpinan daerah. Ini sejalan dengan pandangan Edward (2014) yang menyatakan bahwa dukungan politik dapat memperkuat pelaksanaan kebijakan publik, terutama di tingkat daerah, karena kebijakan publik seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik yang ada.

Berdasarkan temuan ini, teori implementasi kebijakan yang ada, seperti model top-down yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn, dapat digunakan untuk menganalisis lebih lanjut keberhasilan implementasi kebijakan lingkungan di Kabupaten Lebak. Dalam model ini, kesuksesan implementasi sangat bergantung pada kejelasan tujuan kebijakan dan sumber daya yang tersedia. Namun, dalam konteks Kabupaten Lebak, meskipun tujuan kebijakan sudah jelas, keterbatasan sumber daya manusia dan pengawasan menjadi penghalang utama dalam mewujudkan tujuan kebijakan tersebut.

Selain itu, dari perspektif administrasi publik, temuan ini juga menyoroti pentingnya perbaikan struktur birokrasi dan prosedur operasional standar (SOP) dalam pengelolaan kebijakan. Untuk meningkatkan implementasi kebijakan di tingkat daerah, perlu dilakukan modifikasi terhadap struktur birokrasi yang ada, dengan memastikan bahwa setiap lembaga memiliki peran yang jelas dan dapat berkoordinasi dengan baik. Ini juga penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan di tingkat lapangan sesuai dengan yang diinginkan oleh kebijakan pusat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan lingkungan hidup di Kabupaten Lebak menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal keterbatasan sumber daya manusia (SDM), koordinasi antar lembaga, dan penegakan hukum yang lemah. Kendala-kendala ini

mempengaruhi efektivitas kebijakan yang ada, meskipun kebijakan tersebut telah ditetapkan dengan jelas. Temuan ini memperkuat teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle (2014) dan Sabatier & Mazmanian (1983), yang menekankan bahwa kesuksesan implementasi kebijakan sangat bergantung pada faktor administratif, pengawasan yang efisien, dan kapasitas kelembagaan. Temuan penelitian ini memberikan gambaran tentang pentingnya peningkatan kapasitas SDM di Dinas Lingkungan Hidup, perbaikan koordinasi antar lembaga, serta penguatan sistem penegakan hukum dalam memperbaiki implementasi kebijakan di tingkat daerah. Dengan demikian, temuan ini juga membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut yang dapat mendalami pengaruh kepemimpinan politik terhadap implementasi kebijakan di tingkat lokal, serta bagaimana memodifikasi struktur birokrasi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan kebijakan lingkungan. Konsekuensi logis dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas administrasi publik sangat krusial dalam meningkatkan efektivitas kebijakan publik di daerah. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur kebijakan publik dan administrasi publik, khususnya dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup di daerah, serta memberikan wawasan bagi kebijakan yang lebih efektif dan terkoordinasi dalam pengelolaan lingkungan di masa depan.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar pemerintah daerah Kabupaten Lebak meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di Dinas Lingkungan Hidup, baik dari segi jumlah staf maupun keterampilan dalam pengawasan kebijakan lingkungan. Penguatan pengawasan dan evaluasi juga perlu dilakukan agar kebijakan dapat diterapkan secara konsisten. Selain itu, perlu adanya sistem

koordinasi yang lebih baik antar lembaga yang terlibat dalam kebijakan lingkungan, guna menghindari duplikasi tugas dan memastikan peran masing-masing lembaga jelas. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan juga harus diperkuat, dengan memberikan sanksi yang sesuai dan konsisten kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi regulasi lingkungan. Dalam jangka panjang, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika yang ada di tingkat daerah, serta menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut yang dapat mengkaji berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan lingkungan hidup di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, S. (2016). *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Dimock, E., & Dimock, M. (2015). *Policy Making and Public Administration*. Sage Publications.
- Eastone, D. (2017). *Public Policy: Relationship between Government and Environment*. *Public Affairs Review*.
- Edward, G. C. (2014). *Implementing Public Policy: A Framework for Analysis*. *Public Policy Review*.
- Faishal, A. (2016). *Hukum Lingkungan Pengaturan dan Paradigma Industri Hijau*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Grindle, M. S. (2014). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Grindle, M. S. (2014). *Policy Implementation as a Political and Administrative Process*. *Public Affairs Review*.
- Kencana, I. (2015). *Teori Administrasi Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *The Implementation of Public Policy*. Georgetown University Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Sage.
- Pamudji, S. (2016). *Peran Administrasi dalam Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Sahida.
- Sabatier, P. A., & Mazmanian, D. A. (1983). *The Implementation of Public Policy*. Georgetown University Press.
- Thoha, M. (2015). *Teori Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Thread, J. (2017). *Administrasi Negara dan Pengaruhnya dalam Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Udoji, B. (2016). *Policy Implementation in Developing Countries*. *Journal of Public Administration*.
- Van Meter, D., & Van Horn, C. (1975). *A Model of the Policy Implementation Process*. *Administration & Society*.
- Winarno, B. (2016). *Public Policy: Understanding Government Action*. Jakarta: Pustaka Setia.

